

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi nasional. Mosher (1966) menyatakan bahwa pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi secara keseluruhan, karena kemajuan sektor pertanian mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Pembangunan pertanian tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi pedesaan melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Selain itu, sektor pertanian berperan strategis dalam penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan, serta pengurangan tingkat pengangguran.

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi sumber pendapatan bagi mayoritas penduduk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa sektor pertanian berkontribusi sekitar 12,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 29% tenaga kerja di Indonesia. Di tingkat daerah, sektor pertanian juga berperan sebagai penopang utama perekonomian masyarakat pedesaan. Namun, salah satu tantangan utama dalam pembangunan pertanian adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Modal merupakan faktor penting untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi kerja, dan pendapatan petani. Mayoritas petani di Indonesia, khususnya petani kecil di pedesaan, masih mengalami kesulitan mengakses lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan, literasi keuangan rendah, dan prosedur administrasi yang rumit (Wicaksono *et al.*, 2022).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2024) mencatat bahwa penyaluran KUR pada tahun 2023 mencapai Rp260 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 4,5 juta debitur di seluruh Indonesia. Dari total penyaluran

tersebut, sekitar 45% diarahkan ke sektor produksi, termasuk sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa produktif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa KUR memiliki peran strategis dalam mendukung sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki ketergantungan cukup besar terhadap sektor pertanian. Salah satu kabupaten dengan basis ekonomi pertanian yang kuat adalah Kabupaten Tanah Datar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar (2023), sekitar 45,21% penduduk bekerja pada sektor pertanian dan perdagangan, sehingga sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, struktur wilayah Tanah Datar yang didominasi kawasan perdesaan menjadikan sebagian besar rumah tangga menggantungkan pendapatan pada kegiatan pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Tanah Datar sangat bergantung pada ketersediaan akses permodalan yang memadai bagi pelaku usaha tani.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebagai bank milik pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha lokal. Bank Nagari memiliki visi untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah dijangkau dan terjangkau bagi masyarakat (Bank Nagari, 2024). Salah satu bentuk pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Nagari adalah Kredit Komersial yang terdiri atas kredit personal dan kredit komersial produktif.

Kredit Komersial merupakan kredit yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk kegiatan produktif, seperti modal kerja dan investasi usaha, dengan disertai jaminan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak (Mufizar & Lestari, 2014). Kredit Usaha Rakyat (KUR) termasuk dalam kategori Kredit Komersial karena ditujukan untuk kegiatan usaha produktif, baik sebagai modal kerja maupun investasi. KUR diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki usaha layak namun belum memiliki agunan yang cukup sesuai ketentuan perbankan.

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, KUR merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan modal investasi kepada debitur individu, badan usaha, atau kelompok usaha produktif di sektor pertanian, perdagangan, industri, dan jasa dengan dukungan penjaminan pemerintah. KUR dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain KUR Mikro dengan plafon pinjaman maksimal Rp100 juta dan KUR Kecil dengan plafon pinjaman di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta.

Dalam skala daerah, Bank Nagari menjadi salah satu penyalur utama KUR di Provinsi Sumatera Barat. Menurut Bank Nagari (2024), hingga akhir tahun 2024 Bank Nagari telah menyalurkan KUR sebesar Rp1,92 triliun kepada lebih dari 10.539 debitur, atau sekitar 96% dari total plafon yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp2 triliun. Sementara itu, hingga Triwulan I tahun 2024, realisasi KUR di Bank Nagari mencapai Rp540,59 miliar dengan jumlah debitur 3.302 orang, meningkat 28,54% dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu kantor cabang Bank Nagari yang aktif menyalurkan KUR adalah Bank Nagari Cabang Batusangkar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Debitur KUR di cabang ini berasal dari berbagai sektor usaha, terutama sektor pertanian seperti usaha tani padi, hortikultura, peternakan, serta perdagangan hasil pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor dominan penerima fasilitas KUR di Bank Nagari Cabang Batusangkar.

Meskipun KUR memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha pertanian, dalam praktiknya penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko kredit macet. Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari pihak debitur maupun dari pihak lembaga keuangan. Menurut Kasmir (2002), ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan kredit dipengaruhi oleh tiga karakteristik utama, yaitu karakteristik personal debitur, karakteristik usaha yang dijalankan, dan karakteristik kredit yang diterima. Karakteristik personal meliputi usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga. Karakteristik usaha mencakup jenis usaha, lama usaha, serta tingkat pendapatan atau omzet usaha. Sementara itu, karakteristik kredit meliputi besarnya plafon kredit, jangka waktu kredit, dan frekuensi pinjaman. Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada hasil

penelitian terdahulu yang relevan. Simanjuntak (2012) menemukan bahwa lama usaha, omzet usaha, dan plafon kredit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit. Sari (2011) menunjukkan bahwa jangka waktu pengembalian dan tingkat pendidikan berpengaruh nyata terhadap kelancaran pengembalian KUR Mikro. Sementara Rochmawati (2014) membuktikan bahwa usia, laba bersih usaha, jumlah pinjaman, dan jangka waktu pinjaman berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit.

Sektor pertanian memiliki tingkat risiko usaha yang relatif tinggi akibat ketidakpastian cuaca, fluktuasi harga komoditas, serta keterbatasan akses pasar. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pendapatan petani dan pada akhirnya berdampak pada kemampuan pengusaha di bidang pertanian dalam mengembalikan kredit. Permasalahan kemacetan pengembalian kredit perlu mendapat perhatian serius, mengingat KUR merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam membantu permodalan pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor pertanian di PT Bank Nagari Cabang Batusangkar.

B. Rumusan Masalah

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yang lebih dikenal dengan nama Bank Nagari, merupakan bank daerah yang memiliki jaringan pelayanan luas dengan 34 kantor cabang dan 100 kantor cabang pembantu yang tersebar di wilayah Sumatera Barat maupun di luar daerah. Salah satu kantor cabang tersebut adalah Bank Nagari Cabang Batusangkar yang berperan aktif dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Sebagaimana fungsi bank pada umumnya, Bank Nagari Cabang Batusangkar menjalankan peran utama sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Bank Nagari, 2024).

Dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut, Bank Nagari Cabang Batusangkar terus berupaya meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya melalui Kredit Komersil dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan data internal bank (Lampiran 1), posisi Kredit Komersil di Bank Nagari Cabang

Batusangkar menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Desember 2025, total Kredit Komersil tercatat sebesar Rp200.328.505.188. Sejalan dengan hal tersebut, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan total outstanding KUR pada Desember 2025 mencapai Rp92.422.081.941. Data tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2020–2025, KUR memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total Kredit Komersil, dengan rata-rata persentase kontribusi $\geq 44\%$.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh PT Bank Nagari ditujukan kepada berbagai sektor usaha produktif, antara lain sektor pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, dan jasa. Dalam lima tahun terakhir, sektor perdagangan merupakan sektor dengan jumlah debitur KUR terbanyak di Bank Nagari Cabang Batusangkar. Namun demikian, sektor pertanian menempati posisi kedua dengan jumlah debitur yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sektor pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini di (lampiran 6) terutama mencakup kegiatan *on-farm* dan *off farm*. Kegiatan *on farm* merupakan kegiatan usaha yang dilakukan secara langsung dalam proses produksi pertanian, seperti budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sementara itu, kegiatan *off farm* mencakup aktivitas yang berkaitan dengan sektor pertanian namun tidak melibatkan proses produksi secara langsung, melainkan mencakup kegiatan pengolahan hasil pertanian, perdagangan sarana produksi, pemasaran, dan distribusi hasil pertanian. Pada tahun 2025, jumlah debitur KUR di sektor perdagangan tercatat sebanyak 352 orang, sedangkan sektor pertanian mencapai 255 orang. Meskipun demikian, pihak bank menilai bahwa pembiayaan KUR di sektor pertanian memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Risiko tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perubahan iklim ekstrem, potensi gagal panen, bencana alam, keterbatasan infrastruktur, fluktuasi harga hasil pertanian, kelangkaan sarana produksi, serta keterbatasan teknologi yang digunakan oleh petani (Bank Nagari, 2025).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Batusangkar memiliki tingkat suku bunga yang relatif rendah, yaitu sebesar 6% efektif per tahun atau sekitar 0,26% per bulan, sesuai dengan ketentuan pemerintah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.05/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit Program Tahun Anggaran 2025. Kebijakan suku bunga rendah ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Namun demikian, meskipun suku bunga KUR tergolong rendah, permasalahan kredit bermasalah atau kredit macet masih terjadi di Bank Nagari Cabang Batusangkar. Kredit bermasalah tersebut berdampak negatif baik bagi pihak bank maupun debitur. Bagi bank, meningkatnya kredit bermasalah akan berpengaruh terhadap rasio *NonPerforming Loan* (NPL), yang merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, bank dikategorikan tidak sehat apabila memiliki rasio NPL di atas 5%. Data menunjukkan bahwa tingkat NPL KUR Bank Nagari Cabang Batusangkar mengalami penurunan dikategori NPL dan pada tahun 2025 mencapai 6,04% (Lampiran 3). Kondisi tersebut menempatkan Bank Nagari Cabang Batusangkar dalam kategori tidak sehat. Fenomena meningkatnya jumlah debitur bermasalah pada tahun 2025 menjadi perhatian serius karena berpotensi menurunkan kualitas pengembalian kredit serta mengganggu stabilitas penyaluran KUR di masa mendatang.

Sektor pertanian dipilih sebagai fokus penelitian karena memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah Kabupaten Tanah Datar serta menjadi mata pencarian utama sebagian besar masyarakat. Selain itu, sektor pertanian merupakan salah satu sektor dominan penerima fasilitas KUR di Bank Nagari Cabang Batusangkar. Berdasarkan data internal bank, pada tahun 2025 jumlah nasabah KUR sektor pertanian tercatat sebanyak 255 orang, menjadikannya sektor penerima KUR terbesar kedua setelah sektor perdagangan.

Terjadinya kredit macet atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Kasmir (2002), faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit dapat diklasifikasikan ke dalam tiga karakteristik utama, yaitu karakteristik personal,

karakteristik usaha, dan karakteristik kredit. Karakteristik personal meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, serta jarak tempat tinggal debitur dengan Bank Nagari Cabang Batusangkar. Karakteristik usaha meliputi jenis usaha, lama usaha, dan omzet usaha. Sementara itu, karakteristik kredit meliputi plafon kredit, jangka waktu kredit, dan frekuensi pinjaman.

Sektor pertanian sering menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakpastian cuaca, fluktuasi harga komoditas, serta keterbatasan akses pasar yang dapat mempengaruhi pendapatan dan keberlanjutan usaha petani. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pengembalian kredit. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian di PT Bank Nagari Cabang Batusangkar sebagai dasar bagi pihak bank dalam merumuskan strategi pengelolaan risiko kredit yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian diatas, muncul pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana proses debitur memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian di PT Bank Nagari Cabang Batusangkar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian di PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan proses debitur memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian oleh nasabah PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar: Memperbaiki proses appraisal kredit untuk menurunkan NPL KUR sektor pertanian dan meningkatkan portofolio kredit yang sehat.
2. Bagi Nasabah KUR: Memberikan wawasan untuk meningkatkan kemampuan pengembalian kredit melalui peningkatan pengetahuan keuangan dan diversifikasi usaha.
3. Bagi Pemerintah: Menyediakan masukan untuk evaluasi program KUR nasional, termasuk pelatihan petani dan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran guna mendukung pembangunan ekonomi pedesaan.

